

**IMPLEMENTASI PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA (SAGA SAJA) DI KOTA PARIAMAN**

**Dwi Fany Errizal, Abdiana Ilosa**

**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau**

| Article Info   | ABSTRACT  |
|--|---|
| <p><b>Keywords:</b><br/>Human Resources,<br/>Implementation, Government<br/>Programs</p>   | <p><i>This research is motivated by the problem of dropping out of education to higher education due to financial constraints which results in the low quality of human resources and an increase in the poverty rate. The One Family One Bachelor Program (Saga Saja) is the government's flagship program (quick wins) and is one of the government's initiatives in an effort to improve the quality of Human Resources in Pariaman City. The objectives of this research are: 1) To find out how the implementation of the One Family One Bachelor (SAGA SAJA) program in Pariaman City. 2) To find out the factors that influence the implementation of the One Family One Bachelor program in Pariaman City. This type of research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques by means of interviews and documentation. While the research indicators are Policy standards and objectives, Resources, Inter-organizational communication and strengthening activities, Characteristics of implementing agents, Socio-economic and political conditions, and Impelementor Disposition. Based on this research, it can be concluded that the implementation of the One Family One Bachelor (SAGA SAJA) program in Pariaman City has been carried out well, it's just that there are two external factors that influence the implementation of the One Family One Bachelor Program in Pariaman City, including; 1) Limited Human Resources (HR) of Saga Saja program recipients in Pariaman City. 2) Delay in disbursement of scholarship funds.</i></p> |
| Info Artikel   | SARI PATI   |
| <p><b>Kata Kunci:</b><br/><br/>Sumber Daya Manusia,<br/>Implementasi,<br/>Program Pemerintah</p> <hr/> <p>Corresponding Author:<br/><a href="mailto:abdiana.ilosa@uin-suska.ac.id">abdiana.ilosa@uin-suska.ac.id</a></p> | <p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika putus pendidikan menuju perguruan tinggi karena terkendala biaya yang mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan peningkatan angka kemiskinan. Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Saga Saja) merupakan program unggulan (quick wins) pemerintah dan menjadi salah satu inisiatif pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Pariaman. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman. 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan indikator penelitiannya adalah Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi sosial ekonomi dan politik, serta Disposisi Impelementor. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan</p>   |

---

|   |
|---|
| bahwa implementasi program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman sudah terlaksana dengan baik, hanya saja ada terdapat dua faktor eksternal yang mempengaruhi dalam Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman, diantaranya; 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) penerima program Saga Saja di Kota Pariaman. 2) Keterlambatan pencairan dana beasiswa. |
|---|

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi dasar dalam mempengaruhi pertumbuhan, perubahan dan kondisi setiap manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala kecil berkontribusi terhadap sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi untuk menunjang upaya utama dalam pembangunan. Salah satu kunci untuk mencapai tujuan pembangunan adalah peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, melalui pendidikan menjadi satu metode terbaik dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, membangun kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan suatu daerah. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan suatu daerah tanggung jawab tidak mesti hanya diperhatikan dari pihak orang tua, guru, sekolah atau lembaga pendidikan, dan masyarakat tetapi kerjasama dari pihak pemerintah berperan sangat penting terutama sebagai fasilitator dalam memenuhi kebutuhan proses pembelajaran (sarana prasarana) dan pembiayaan pendidikan.

Kualitas suatu bangsa dapat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satu faktor utamanya adalah pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mengangkat taraf suatu bangsa. Sebagaimana hal ini tercantum, Menurut UU No 20 tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dengan demikian, upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan saja tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pendidikan secara penuh memiliki pengaruh dalam tumbuhnya perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara berkembang. Di bandingkan dengan negara maju, laju pertumbuhan penduduk di negara berkembang jauh lebih tinggi. Berdasarkan input yang digunakan dalam produksi pendapatan nasional, jumlah sumber daya manusia meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan nasional dan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pendidikan merupakan komponen kunci pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, maka kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan kebutuhan yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi. Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan salah satu jenis strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikan gratis hingga SMA, yang bermaksud setiap siswa yang memasuki sekolah wajib menyelesaikan pendidikannya sampai SMA atau lebih tinggi dan pemerintah wajib menyediakan dan memodifikasi fasilitas sampai waktu tertentu. Program ini bertujuan agar generasi bangsa sekurang-kurangnya tamatan sekolah menengah sekaligus kesinambungan dari program sebelumnya guna menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045 mendatang. Menurut Irdiyanto (2014), selaku Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan menengah universal (PMU) ini mempunyai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaannya sehingga program (PMU) ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pendidikan menengah yang bermakna dan menyeluruh. Selain itu, pemerintah juga menyediakan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa sekolah menengah baik negeri maupun swasta, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari keluarga tidak mampu yang diberikan langsung ke siswa,

sehingga banyak tersedia sarana dan prasarana pendidikan seperti Unit Sekolah, Ruang Kelas, Ruang Rehabilitasi Kelas, Peralatan Pendidikan hingga kesejahteraan pendidik, tenaga didik, serta semua warga sekolah tersebut.

Namun, untuk empat tahun masa perguruan tinggi negeri pemerintah belum menerbitkan untuk biaya gratis sehingga akses ke perguruan tinggi oleh pemuda/i tamat sekolah menengah atau sederajat masih menjadi angan yang belum terwujud. Akan tetapi, beberapa provinsi daerah kabupaten atau kota pemerintah setempat telah mencanangkan program khusus untuk akses keperguruan tinggi negeri salah satunya di Provinsi Sumatera Barat, Kota Pariaman. Bentuk keseriusan ini, masuk dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali direvisi dan mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015, kemudian Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025, dan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman. Sehingga menjadi sebuah keharusan bahwa pembaharuan terhadap pendidikan dapat di implementasikan di seluruh provinsi baik kota maupun kabupaten. Dan program Satu Keluarga Satu Sarjana (Saga Saja) merupakan salah satu solusi terbaik yang diterapkan pemerintah Kota Pariaman. Genius Umar selaku Wali Kota Pariaman, menyatakan bahwa sebagai bagian dari program jangka panjang pemberdayaan atau perencanaan keluarga. Ia juga menjelaskan bahwa sudah terdapat sekitar 400an anak dari program Saga Saja yang telah dikuliahkan di berbagai tempat perguruan tinggi negeri yang nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang berharga demi terciptanya masyarakat yang berdaya. Sedangkan tahap pelaksanaan program jangka pendeknya ditangani oleh Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) dan Dinas Sosial, secara khusus mereka akan menangani sebagaimana kelompok keluarga yang belum berdaya tersebut dengan membentuk (KUBE) Kelompok Usaha Bersama dan (KWT) Kelompok Wanita Tani. (pariamankota.go.id, 2023).

Kota Pariaman merupakan salah satu kota kecil di provinsi Sumatera Barat, dekat dari pesisir pantai yang dominan penduduknya hidup sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Hal ini disebabkan oleh rata-rata rasio SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki penduduk. Hasil pembaharuan Badan Pusat Statistik terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman pada 2019 (76,70%), 2020 (76,90%), 2021 (77,07%), Pada tahun 2023, berdasarkan hasil sensus, Kota Pariaman berpenduduk sebanyak 96.719 jiwa, terdiri dari 48.864 jiwa laki-laki dan 47.855 jiwa perempuan.

**Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Pariaman Tahun 2019-2021**

| No. | Kecamatan        | Laju Pertumbuhan |        |        |
|-----|------------------|------------------|--------|--------|
|     |                  | 2019             | 2020   | 2021   |
| 1.  | Pariaman Selatan | 1,81 %           | 2,16 % | 2,08 % |
| 2.  | Pariaman Tengah  | 0,47 %           | 0,95 % | 0,73 % |
| 3.  | Pariaman Timur   | 0,36 %           | 2,77 % | 2,49 % |
| 4.  | Pariaman Utara   | 1,49 %           | 1,59 % | 1,28 % |
| 5.  | Kota Pariaman    | 1,00 %           | 6,47 % | 1,52 % |

Sumber : BPS Kota Pariaman (9 Juni 2022).

Berdasarkan data tersebut, hal ini menandakan bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2020, jumlah penduduk mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari tahun 2020 ke tahun 2021 sedikit mengalami penurunan dan sekian persentase saja. Dampak yang dapat timbul dari laju pertumbuhan dan jumlah penduduk yang tinggi bisa berbagai macam konsekuensi terjadi, diantaranya adalah angka kemiskinan yang terus me ningkat, meningkatnya pe ngangguran karena lahan kerja yang sempit, kete rsediaan akan pangan yang sulit, dapat membuat sebagian besar penduduk tidak mendapatkan

layanan kesehatan yang memadai sehingga menurunkan standar kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang ditandai dengan rendahnya potensi sumber daya manusianya.

Pada periode 2013-2017, Kota Pariaman berdasarkan angka pendidikan yang ditamatkan terlihat adanya pertumbuhan negatif pada jenjang diploma se derajat. Selain itu, statistik BPS Kota Pariaman 2018, menyebutkan bahwa persentase penduduk yang bersekolah di Kota Pariaman hanya sekitar 10,36 %. Data tersebut menunjukkan sebagian besar masyarakat Kota Pariaman hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kota Pariaman masih belum mampu meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, indikator program prioritas pemerintah Kota Pariaman disediakan oleh Satu Keluarga Satu Sarjana ini agar dapat mengatasi permasalahan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nantinya. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, rujukan dapat dilihat melalui peningkatan angka rata-rata lama sekolah Kota Pariaman, dimana direvisi pada tahun 2018 sebesar 10,10, tahun 2019 menjadi 10,30, tahun 2020 menjadi 10,59 dan 10,67 pada tahun 2021 ditambah lagi dengan kondisi pandemic COVID-19 yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun negara (Nofiard Syarif, dkk 2021).

Pemerintah sudah melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi potensi masyarakat miskin, salah satunya adalah meluncurkan program “Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA). Program ini merupakan bagian dari visi kepala daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dan keberhasilan dari bantuan beasiswa bukan diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, akan tetapi didasarkan pada keberhasilan penyelesaian program studi bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan agar dapat terlihat kebermanfaatannya dari pemberian beasiswa kepada mahasiswa/i yang mampu sehingga prestasi akademik maupun kualitas sumber daya manusia juga terus meningkat. Program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa dari Keluarga miskin yang berasal dari Kota Pariaman. Beasiswa bantuan pendidikan yang diberikan berupa biaya SPP dan uang bulanan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu DIII selama 3 (tiga) tahun/enam semester dan S1 selama 4 (empat) tahun/delapan semester. Jenis beasiswa yang diberikan adalah beasiswa untuk masyarakat miskin dan sasaran penerima beasiswa adalah calon mahasiswa yang berasal dari masyarakat miskin Kota Pariaman yang lulus tes administrasi dan tes akademik pada Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemberian beasiswa ada beberapa ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan penerima beasiswa dari program Saga Saja. Persyaratan umum penerima merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) yang berdomisili atau berasal dari Kota Pariaman yang ditandai dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga; berasal dari kelompok kurang mampu atau miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa yang akan dicocokkan dengan Basis Data Terpadu dari Dinas Sosial Kota Pariaman; Bebas NARKOBA yang disertai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; serta Surat Pernyataan tidak merokok dari yang bersangkutan dan orang tua yang ditandatangani di atas meterai. Sedangkan, untuk persyaratan khusus calon penerima beasiswa akan disesuaikan dengan Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama. Pemberian beasiswa ini juga dapat dihentikan sementara apabila mahasiswa tidak mencapai Indeks Prestasi (IP) 2,75 (skala 4) dapat dilanjutkan kembali apabila semester berikutnya memperoleh IP besar atau sama dengan 2,75; dan mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah karena sakit atau halangan lainnya dengan batas waktu paling lama 6 bulan (1 semester). Selain itu, pemberian beasiswa dapat dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa; melakukan pelanggaran pidana, mengundurkan diri, meninggal dunia dan dikeluarkan (*Droup Out*) oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Seiring berjalannya program Saga Saja cukup disambut baik oleh masyarakat Kota Pariaman. Walaupun berperan sebagai program unggulan, Namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang mungkin timbul di lapangan baik dari organisasi pemerintah atau masyarakat penerima program. Diantaranya, masyarakat memiliki harapan yang lebih besar dari sisi jumlah porsi bantuan, persyaratan yang ditetapkan tidak semua masyarakat

yang bisa memiliki dan mendapatkan, begitu juga dengan pemilihan kampus tujuan yang dianggap belum memiliki prestisei yang tinggi dimata masyarakat, serta sekelumit dinamika dalam implementasi yang perlu dievaluasi.

Rumusan Masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman? 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program satu keluarga satu sarjana (Saga Saja) di Kota Pariaman?

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari rumusan masalah diatas yang akan di teliti, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini diantaranya: 1) Untuk dapat mengetahui Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman. 2) Untuk dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman.

## **METODE**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Berdasarkan permasalahan dan ditinjau peneliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua jenis sumber data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang benar dan dibutuhkan dalam penelitian penulis. Maka, dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, Studi Dokumentasi. Menurut Bogdan dan Biklein (1992) dalam Husaini dan Purnomo, (1995) analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambahkan pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Sedangkan, Nasution (1988) menyatakan analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Saga Saja) di Kota Pariaman**

Implementasi dalam tahapan proses kebijakan publik, pada umumnya diterapkan apabila suatu kebijakan telah ditetapkan melalui beberapa rangkaian aktivitas sehingga kebijakan tersebut membawa hasil seperti yang diharapkan. Pada prinsipnya, implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980:6) bahwa tugas dari suatu implementasi ialah membangun jaringan yang memungkinkan suatu tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah suatu badan atau satuan kerja yang ada di Kota Pariaman, lembaga tersendiri yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Terdapatnya Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki peran penting sebagai unsur pelaksana teknis Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lapangan yang disebut UPTD sehingga dapat mendorong penguatan dalam proses pelaksanaan implementasi. Kemudian dalam susunan organisasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan penyusunan dan pengaturan berbagai bagian baik dari Unit Kerja Bidang, Seksi maupun Jabatan Fungsional yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu sehingga menjadi suatu kesatuan.

Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman, peneliti menggunakan indikator menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam buku Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik diantaranya; Standar dan Sasaran

Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi sosial ekonomi dan politik, Disposisi implementor.

## 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam standar dan sasaran kebijakan, implementasi harus jelas dan terukur agar tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi. Implementasi kebijakan dapat dinilai kinerjanya melalui keberhasilan dari suatu standar dan sasaran kebijakan yang realistis. Apabila standar dan sasaran kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan, maka akan sulit juga untuk dapat melaksanakannya. Selain itu, untuk dapat melihat kinerja implementasi dari suatu kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui standar dan sasaran kebijakan yang juga tidak lepas kaitannya dengan peraturan Walikota/Perwako yang menjadi landasan dalam implementasi kebijakan program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan.

### a. Standart Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasubag Umum dan Program di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu bapak Qadri Eka Putra, ST yang mengatakan:

*“Dalam menjalankan kebijakan, Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Saga Saja) di Kota Pariaman, kami pemerintah memiliki standar kebijakan yakni sesuai dengan Peraturan Walikota (perwako) No. 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 yang dimana juga kami jadikan pedoman dalam RJPMD Kota Pariaman yang memuat visi, misi dan Program Walikota/Kepala Daerah.” (Wawancara, 25 April 2024)*

Pernyataan di atas juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Bisri Amra, SE, M.Si selaku Perencana Ahli Muda di Bappeda juga mengatakan bahwasannya :

*“Program Saga Saja ini memang menjadi salah satu program unggulan yang telah dituangkan di dokumen RPJMD pada periode 2018-2023 yang ditetapkan oleh Perda. Yang kemudian segala ketentuan terdapat dalam Peraturan Walikota (perwako) No. 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman.” (Wawancara, 29 April 2024).*

### b. Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Bisri Amra, SE, M.Si selaku Perencana Ahli Muda di Bappeda juga mengatakan bahwasannya:

*“terkait sasaran atau pun tujuan dari program ini ialah untuk memutus rantai kemiskinan di Kota Pariaman, yang dimana terdapatnya masyarakat pariaman ini punya kemampuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi tapi tidak ada biaya, maka dari itu program Saga Saja ini diluncurkan oleh Pemerintah Kota.” (Wawancara, 29 April 2024)*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Umum dan Program di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu bapak Qadri Eka Putra, ST yang mengatakan:

*“Berdasarkan sasarannya pemberian beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin yang berasal dari Kota Pariaman dan namanya terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).” (Wawancara, 25 April 2024).*

Dari wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa suatu proses implementasi dapat diukur tingkat keberhasilannya jika mempunyai standar dan sasaran kebijakan. Hal ini dikarenakan standar dan sasaran kebijakan dapat menjadi acuan/pedoman/ atau pun landasan oleh para implementor agar para pelaksana efektif dalam menjalankan implementasi kebijakan serta menentukan berhasil atau tidaknya proses implementasi dalam program Saga Saga di Kota Pariaman. Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemko sudah mengimplementasikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana sesuai dengan Standar Kebijakan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Walikota (perwako) No. 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman. Kemudian, Sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya program ini yaitu ditujukan kepada masyarakat miskin yang berasal dari Kota Pariaman dan namanya terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga bisa memutus rantai kemiskinan dan memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota Pariaman.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya yaitu kemampuan yang dimiliki dan menjadi pendukung dalam proses implementasi Program Saga Saja di Kota Pariaman. Setiap proses pelaksanaan kebijakan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketersediaan akan sumber daya yang memadai. Menurut Van Meter dan Van Horn keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, baik itu berupa sumber daya fasilitas atau pun finansial anggaran yang telah disediakan.

Ketersediaan sumber daya manusia yang disertai dengan kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan akan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan keberhasilan dalam setiap proses pengimplementasian kebijakan.

### **a. Kualitas dan Kuantitas SDM**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasubag Umum dan Program di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu bapak Qadri Eka Putra, ST yang meingatakan bahwasannya:

*“ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan dari program Saga Saja di Kota Pariaman ini kami sudah berjalan baik, hal itu dapat diukur secara nyata melalui tim/ agen pelaksana dapat bekerja sama dengan baik diantaranya Bappeda/Kesra, Baznas, dan masyarakat/mahasiswa-mahasiswi terpilih yang andil dalam menyukseskan program jangka panjang ini.” (Wawancara 25 April 2024).*

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara deingan Bapak Bisri Amra, SE, M.Si seilaku Perencana Ahli Muda di Bappeda mengatakan :

*“Yang pastinya untuk Program Saga Saja ini kita lebih banyak ke anggaran. Artinya,*

*tentu orang-orang yang sudah dikuliahkan dari periode-periode sebelumnya tetap kita alokasikan anggaran baik sampai mahasiswa ini lulus dari kampusnya sehingga berdaya guna nantinya. Dalam hal ini, ipk mahasiswa hendaklah bagus tiap semesternya minimal 2,75 seandainya terdapat semester tertentu ipknya dibawah dari 2,75 maka semester berikutnya mahasiswa ini menanggung (bayar sendiri) dan apabila mahasiswa ini mendapat ipk 3,75 maka kami berikan reward.” (Wawancara, 29 April 2024).*

Pernyataan di atas juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Husnal Prima, S.HI selaku Sekreitaris Baznas yang mengatakan:

*“Kami mengharapkan ada dampak kontribusi juga dari mereka nantinya, dimana setelah lulus dari Universitas bisa bekerja dan nanti bisa membantu ataupun menghidupi keluarganya. Akan tetapi dalam program ini orientasi kami lebih utamakan kepada pendidikan anak tersebut untuk meminimalisirkan rendahnya kualitas SDM dan angka kemiskinan yang ada di Kota Pariaman ini.” (Wawancara, 29 April 2024).*

## **b. Fasilitas Pendukung**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Bisri Amra, SE, M.Si selaku Pereincana Ahli Muda di Bappeda meingatakan :

*“Berbicara terkait fasilitas pendukung dalam program ini. BAPPEDA lebih kontribusi penuh dalam anggaran bersama dengan Baznas, kemudian kami mengalokasikan ke OPD terkait yaitu (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) kurang lebih setiap tahunnya sekitar 1,2 miliar sebagai dana untuk Program Saga Saja ini dengan target 100 anak setiap tahunnya dan tahun berikutnya juga bisa terjadi penambahan target. Selain itu, sumber daya non teknis, kami dari Bappeda itu berupa regulasi/kebijakan-kebijakan seperti Perwako dan SK (Surat Keputusan). (Wawancara, 29 April 2024)*

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Umum dan Program di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu bapak Qadri Eka Putra, ST mengatakan:

*“Dalam fasilitas pendukung, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai pengelola penuh mahasiswa penerima beasiswa biasanya berupa ketersediaan sarana prasana yang diperlukan, seperti peminjaman gedung untuk tes calon mahasiswa yang memilih perguruan tinggi diluar provinsi. Dan juga sumber daya waktu” (Wawancara 25 April 2024).*

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam implementasi program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman terbukti terdapatnya beberapa sumber daya yang dapat dijadikan alat pengukur keberhasilan implementasi dalam Program Implementasi Saga Saja di Kota Pariaman tersebut diantaranya yaitu sumber daya manusia berupa kualitas dan kuantitas SDM yang perlu dimiliki implementor agar konsisten dalam menyukseskan program Saga Saja di Kota Pariaman. Kemudian, sumber daya non manusia yang berupa finansial anggaran yang memadai, sumber daya waktu, regulasi/kebijakan, dan sarana prasana yang diperlukan.

### 3. Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi. Setiap program akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang baik antara pelaksana program dan sasaran program. Dalam berbagai kasus dan mewujudkan keberhasilan pengimplementasian kebijakan juga perlu didukung, dikoordinasikan dan komunikasi yang efektif dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, maka kemungkinan kesalahan akan sedikit. Koordinasi dan komunikasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

#### a. Proses Interaksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Umum dan Program di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu bapak Qadri Eka Putra, ST mengatakan:

*“dalam informasi dan komunikasi, kami pertama dalam memperkenalkan program ini interaksi kepada masyarakat Pariaman melalui sosialisasi ke Sekolah-sekolah SMA/MA yang ada di Kota Pariaman. Kedua, melalui Media Sosial, baik media sosial Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maupun media sosial Pemko. Dan ketiga kami menyebarkan program ini melalui pamflet/flyer dan melalui spanduk ada juga dibeberapa tempat umum. Dan sejauh ini, program ini cukup disambut baik oleh masyarakat”* (Wawancara, 25 April 2024).

Kemudian pernyataan yang peneliti dapatkan dari Mahasiswa Penerima Saga Saja periode 2020, yaitu Firda Zuliya jurusan Manajemen Logistik Industri Agro dari Politeknik Akademi Teknologi Industri Padang yang mengatakan:

*“dalam pelayanannya interaksi Pemko kepada Mahasiswa/i penerima Saga Saja itu pelayanannya cukup baik. Bagi kami yang terkadang ada kendala administrasi diberikan bantuan secepatnya. Seperti, jika pencairan dana sangat lama membuat kami terkendala dalam pengumpulan administrasi dan perkuliahan karena pembayaran UKT belum dilakukan sehingga untuk mengisi SKS tertunda. Akan tetapi, setelah Pemko mengetahui problem kami Pemko Pariaman membantu kami dengan segera”* (Wawancara, 16 April 2024).

#### b. Koordinasi instansi pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mahasiswa Penerima Saga Saja periode 2020, yaitu Firda Zuliya jurusan Manajemen Logistik Industri Agro dari Politeknik Akademi Teknologi Industri Padang mengatakan:

*“saat masa perkuliahan berlangsung, apabila terkendala administrasi karena pencairan beasiswa yang lama pemko langsung menyelesaikan permasalahan ini dengan berkoordinir langsung dengan pihak kampus”* (Wawancara, 16 April 2024).

Pernyataan diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Bisri Amra, SE, M.Si selaku Perencana Ahli Muda di Bappeda yang mengatakan:

*“ketika terjadi sebuah permasalahan atau hal-hal yang tidak diduga dalam proses implementasi ini, baik di OPD terkait, instansi terkait, atau pun di masyarakat. Dalam Program ini Walikota juga menugaskan kami Bappeda sebagai mengkoordinir bahkan terkadang menjadi pemimpin dalam kegiatan ini dan biasanya kami langsung Undang, kita rapatkan OPD terkait, Baznas dan tokoh masyarakat yang kita anggap relevan dengan Program Saga Saja, kemudian kami menganalisa apa penyebab dari*

*permasalahan tadi dan mencari solusi terbaik. Dan terkait pencairan dana yang kemungkinan lama itu juga sudah kami koordinasikan dengan pihak kampus yang bersangkutan.” (Wawancara, 29 April 2024).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa komunikasi antar instansi atau organisasi pelaksana, melalui proses interaksi yang telah dilaksanakan dan koordinasi kepada sasaran sudah cukup efektif. Walaupun terdapat kendala bagi penerima beasiswa saat proses implementasi program Saga Saja, Namun pemko langsung menemukan solusi bagi agen implementor. Dalam hal ini, pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan dilaksanakan melalui sosialisasi-sosialisasi, rapat antar agen implementor serta beberapa evaluasi dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Selain pelaksanaan komunikasi yang dilakukan secara formal, pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam proses implementasi program Saga Saja juga dilakukan secara informal melalui grup *WhatsApp* bagi penerima beasiswa yang sedang menjalankan studi dan beberapa informasi penting melalui *Web/ Media Sosial*, baik media sosial Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maupun media sosial Pemko.

### **c. Dukungan instansi pelaksana/pembeirian Reiward**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Umum dan Program di Dinas Peindidikan Pemuda dan Olahraga yaitu bapak Qadri Eka Putra, ST mengatakan:

*“Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai pengelola penuh program ini kami sangat mendukung dan mengawal penerima beasiswa ini. Apabila apabila mahasiswa ini mendapat ipk 3,75 maka kami berikan reward sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)” (Wawancara, 25 April 2024)”*

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bisri Amra, SE, M.Si seilaku Perencana Ahli Muda di Bappeda juga meingatakan bahwasannya:

*“Dalam program Saga Saja, kami Bappeda sangat mendukung otomatis partisipan yang ikut dalam program ini karena ini salah satu visi dan misi, serta program unggulan Kepada Daerah yang kita tuangkan di dokumen RJPMMD yang dimana hal ini disusun langsung oleh Bappeda. Program Saga Saja ini juga merupakan program yang bagus dan sudah mendapat dukungan dari pusat, bahkan Pak Genius selaku Walikota periode 2018-2023 sudah mendapatkan penghargaan terhadap Program Saga Saja ini. Namun, disini kami tidak terlalu melihat besar atau tidaknya biaya yang dikeluarkan tetapi yang penting kita tertuju pada targetnya dan target ini disesuaikan dengan anggaran yang diberikan. Biasanya kami menargetkan 100 lulusan setiap tahunnya tetapi tidak semua berjalan sesuai dengan yang dikehendaki karena lain halnya faktor diluar kendali kami. Tapi yang pastinya APBD Bappeda dan Baznas mengkolaborasikan penganggaran.” (Wawancara, 29 April 2024).*

### **d. Konsistensi agen pelaksana**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Umum dan Program di Dinas Peindidikan Pemuda dan Olahraga yaitu bapak Qadri Eka Putra, ST mengatakan:

*“Berawal dari harapan kami dan Walikota yang menargetkan setiap tahun itu terdapat*

*100 orang lulusan dalam Program Saga Saja ini. Akan tetapi, kenyataannya tidak ada yang benar 100 orang, bukan karena peminat program ini yang kurang karena peminat sangat banyak bahkan bisa mencapai 200/300-an siswa dari beberapa SMA/MA sederajat tetapi setelah diseleksi dengan beberapa administrasi, tes masuk kampus kami menerima 100 calon mahasiswa/i tersebut. Dan sukses atau tidaknya Pemko dalam pelaksanaan program ini semua juga tergantung dari para agen (pelaksana) yang menjalankan, karena ada beberapa yang tidak sampai lulus dari kampus dan berhenti ditengah jalan karena beberapa faktor yang terjadi diluar kewenangan pemko. Seperti; orangtua yang bersikeras dan mengandalkan orang dalam untuk anaknya lolos seleksi padahal anak minim minat untuk melanjutkan kuliah, mahasiswa/i yang nilainya rendah karena kebiasaan waktu SMA malas-malasan belajar terbawa dibangku perkuliahan sehingga ipk rendah tidak bisa mendapatkan beasiswa semester berikutnya dan membuat mereka beberapa dari mereka berhenti dalam masa perkuliahan, selain itu juga dipengaruhi oleh mindset dan faktor lingkungan dari mahasiswa/i tersebut.” (Wawancara, 25 April 2024).*

Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Mahasiswa Penerima Saga Saja periode 2020, yaitu Firda Zuliya jurusan Manajemen Logistik Industri Agro dari Politeknik Akademi Teknologi Industri Padang yang mengatakan:

*“saat masa perkuliahan berlangsung, pada angkatan saya dan dikampus yang sama pada tahun 2020 ada terdapat beberapa para mahasiswa yang memutuskan untuk tidak melanjutkan perkuliahan karena faktor eks dan mendapat ipk dibawah 2,75 sehingga tidak mendapat beasiswa pada semester berikutnya.” (Wawancara, 16 April 2024).*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada karakteristik agen pelaksana telah difokuskan kepada kewenangan masing-masing implementor dalam keterlibatannya dengan program ini. Dalam hal ini dapat terlihat perangkat daerah yang terlibat dalam program ini sudah tahu tugasnya masing-masing saat diinstruksikan untuk melaksanakan program ini. seperti, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai pengelola dan menghimpun penuh semua rangkaian pelaksanaan yang diberikan oleh Walikota. Bappeda dan Baznas yang memegang totalitas penuh atas keiteintuan peanggaran yang akan diberikan ke Mahasiswa yang berhak menerima. Di samping itu, tidak hanya dari segi anggaran Bappeda juga memiliki tugas sebagai koordinator yang ditunjuk Walikota melalui Sekretariat Daerah untuk memeriksa, memverifikasi, serta mengeisahkan semua ketentuan regulasi atau kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam masyarakat atau pun perangkat daerah terkait baik itu OPD terkait, Baznas, Kampus yang terikat MOU serta Mahasiswa penerima beasiswa Saga Saja. Sedangkan Mahasiswa yang menjalankan program ini, menunjukkan masih diperlukannya upaya pendukung kekonsistenannya agar tidak berhenti dan tetap melanjutkan pendidikan selama masa perkuliahan.

#### **4. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Menurut teori Van Meter dan Van Hor kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi

kebijakan. Sejauh mana kelompok – kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik partisipan yang mendukung atau menolak, serta sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik dalam program ini terlibat dalam mendukung implementasi kebijakan.

#### **a. Kondisi Sosial**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan Mahasiswa Penerima Saga Saja periode 2018, yaitu Putri Ramadhani jurusan Administrasi Bisnis dari Politeknik Negeri Padang yang mengatakan:

*“sebagai alumni penerima beasiswa Saga Saja ini, dari segi sosial saya diberikan kesempatan berpengalaman untuk ikut mensosialisasikan adanya program ini ke sekolah-sekolah di kota pariaman sehingga memberikan dampak nantinya. Karena jika memang ada keinginan/ niat utk melanjutkan pendidikan dan tidak mampu secara finansial itu udah menjadi tanggung jawab kota pariaman untuk mereka bisa kuliah. (Wawancara, 5 Mei 2024)*

Pernyataan diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Kasubag Umum dan Program di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu bapak Qadri Eka Putra, ST mengatakan:

*“sebagai pengelola dan penghimpun program ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan dan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat di Kota Pariaman, hanya saja terkadang saat pelaksanaan program ini terdapat sedikit keluhan dari masyarakat atau pun calon penerima. Diantaranya : ada yang menginginkan kampus yang lebih bagus dibanding apa yang sudah didapat ketika sudah lulus seleksi, memohon untuk mendapatkan beasiswa akan tetapi tidak memenuhi syarat salah satunya karena tidak terdata dalam DTKS. Dan hal lainnya yang menjadi diluar kewenangan kami.” (Wawancara, 25 April 2024)*

#### **b. Kondisi Ekonomi**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Husnal Prima, S.HI selaku Sekretaris Baznas yang mengatakan :

*“saat proses seleksi kami dari pihak Baznas benar-benar terlibat untuk mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa ini terutama kami meninjau dari ekonomi keluarga, apakah masuk kategori mustahiq atau bukan. Selain itu, Berdasarkan hasil dari setiap evaluasi. Kami dari Baznas juga mengharapkan ada dampak kontribusi juga dari mereka nantinya, dimana setelah lulus bisa membantu dari segi ekonomi ataupun menghidupi keluarganya.” (Wawancara, 29 April 2024)*

Pernyataan diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Mahasiswa Penerima Saga Saja periode 2018, yaitu Putri Ramadhani jurusan Administrasi Bisnis dari Politeknik Negeri Padang yang mengatakan :

*“dengan adanya program ini, secara ekonomi saya merasa sudah sangat terbantu. Hanya di suruh fokus ke pendidikan karena uang saku juga dikasih. Dan kalau ipk ada yang diatas 3,75 diberikan reward sebanyak Rp 1.000.000-,”. (Wawancara, 5 Mei 2024).*

#### **c. Kondisi Politik**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mahasiswa Peineirima Saga Saja periode 2018, yaitu Putri Ramadhani jurusan Administrasi Bisnis dari Politeknik Neigeri Padang yang meingatakan:

*“kalau dari segi politik, dalam implementasi Saga Saja saya tidak pernah melihat program ini melibatkan politik, namun pemerintah Kota Pariaman kurang mendukung aksi demonstrasi mahasiswa yang mendapat beasiswa ini untuk turun kejalan khususnya pak walikota mengatakan larangan untuk mahasiswa yang terlibat dunia politik.”* (Wawancara, 5 Mei 2024).

Pernyataan diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama bapak Bisri Amra, SE, M.Si selaku Perencana Ahli Muda di Bappeda yang mengatakan bahwasannya:

*“terkait kondisi politik ini tidak menjadi kewenangan Bappeda karena ranah-nya ini lebih kepada Kepala Daerah dan DPRD yang terpilih jadi itu bukan menjadi keterlibatan kami dalam proses Implementasi Saga Saja ini. Beda halnya terkait kondisi sosial dan ekonomi, Bappeda sangat terlibat terbukti dalam rangkain struktur organisasi di Bappeda kami memiliki beberapa bidang termasuk bidang Sosial, Ekonomi, infrastruktur, dan lainnya khusus mengurus bidang tersebut sesuai keahliannya.”* (Wawancara, 29 April 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menganalisa dengan menggunakan teori Van Meter dan Varn Horn dalam (Suharno, 2013) indikator terkait kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik dalam Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman meinunjukkan bahwa dalam kondisi sosial dan ekonomi sudah berperan dengan baik hal ini ditunjukkan masyarakat merasa terbantu akan kondisi perekonomian ataupun sosialnya, sedangkan dari segi politik program ini sama sekali tidak melibatkan politik dalam proseis pelaksanaan oleh para agen implemeintor.

## **5. Disposisi Implementor**

Disposisi merupakan suatu faktor penting dalam sebuah pelaksanaan suatu kebijakan karena hal ini menyangkut tentang perilaku implementor. Dalam teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn sikap atau disposisi implementor ini meliputi respon/tanggapan impelemtor terhadap suatu kebijakan, pemahaman implementor terhadap suatu kebijakan dan intensitas disposisi implementor (preferensi nilai).

### **a. Respon impleimenter terhadap kebijakan**

Dalam hal ini mecakup pada yang akan mempeingaruhi keimauannya untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahasiswa Penerima Saga Saja peiriode 2020, yaitu Firda Zuliya jurusan Manajemein Logistik Industri Agro dari Politeknik Akademi Teknologi Industri Padang yang mengatakan:

*“sebagai penerima program beasiswa program Satu Keluarga Satu Sarjana menurut saya program ini sangat baik. Program ini sangat membantu para lulusan SMA yang ingin berkuliah namun terkendala oleh biaya. Dengan adanya program ini sangat membantu para anak muda untuk bisa menempuh pendidikan di jenjang perkuliahan dan mendapatkan lowongan pekerjaan yang lebih layak nantinya dimana bisa membantu perekonomian keluarga. Sejauh ini selama saya mendapat beasiswa, pelayanan yang diberikan oleh pemko pariaman kepada penerima beasiswa, itu pelayanan nya cukup baik mulai dari rekrutmen – lulus kuliah. Bagi kami yang terkadang ada terkendala administrasi itu dibantu secepatnya. Dan harapan saya*

*pribadi untuk program beasiswa ini ialah dari segi universitas nya pemko agar lebih banyak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak universitas di luar Sumbar lainnya yang sangat mumpuni sehingga lebih banyak memberikan peluang-peluang yang baik kepada para pelajar.” (Wawancara, 16 April 2024).*

Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Mahasiswa Penerima Saga Saja periodei 2018, yaitu Putri Ramadhani jurusan Administrasi Bisnis dari Politeknik Negeri Padang yang mengatakan:

*“sebagai angkatan pertama yang menerima sebuah program beasiswa ini, saya perhatikan program ini sudah tergolong cukup baik jika dilihat dari tahun ke tahunnya. Dan ini sebenarnya juga salah satu upaya dari angkatan 2018 dimana bisa sukses kedepannya karena 2018 adalah angkatan yang menjadi contoh. Kalau seandainya angkatan 2018 itu tidak sukses mungkin waktu itu program nya bisa saja berhenti, alhamdulillah tekad dari angkatan 2018 itu cukup besar dan bisa mensukseskan sehingga terbukti sekarang pemko memberikan peluang lebih lagi dari kami sebelumnya, seperti sekarang sudah mulai banyaknya peluang beasiswa diberikan untuk berkuliah di luar provinsi Sumatera Barat.” (Wawancara, 5 Mei 2024).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas implementor merespon program ini dengan baik. Para implementor mendukung dan menerima sehingga mampu menjalankannya dengan baik. Dalam hal ini para implementor juga menjalankan program ini tanpa adanya bentuk penolakan mengingat program ini memiliki dampak yang baik untuk masyarakat dan dengan adanya tanggapan positif dari implementor ini sangat mendukung terhadap pelaksanaannya program Saga Saja di Kota Pariaman. Menurut Wahab (2010) bahwa apabila pelaksanaan kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka diprediksi kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, begitu juga sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif dan efisien. Dalam hal ini berarti dalam hal sikap pelaksana program ini baik sehingga pelaksanaan program juga berjalan dengan baik.

#### **b. Kognisi (pemahaman terhadap kebijakan)**

Yakni pemahaman implementor terhadap kebijakan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bappeda, Baznas dan Mahasiswa yang terlibat untuk menyukseskan program ini sudah mengeirtu tujuan dari program ini. Terbukti dalam memenuhi hak mahasiswa dan mengatasi permasalahan yang terjadi pada mahasiswa pemko langsung melakukan solusi dan evaluasi. Seibagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Bisri Amra, SE, M.Si selaku Perencana Ahli Muda di Bappeda yang mengatakan:

*“kami dari Bappeda mempunyai kewenangan dalam merumuskan sebuah program. Sebagai pihak yang berwenang dalam program yang sudah kita rumuskan juga dalam RPJMD ini, tentunya kami selalu mengawal dan memastikan program ini berjalan dengan baik atau tidak. Namun, untuk meng-handle penuh setiap programnya*

*diberikan kepada OPD teknis, dalam hal ini program Saga Saja di Kota Pariaman ini dikelola dan dihimpun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan kami dari Bappeda juga selalu memberikan pemahaman ke OPD terkait untuk menjalankan tugas.”* (Wawancara, 29 April 2024)

Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Umum dan Program di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu bapak Qadri Eka Putra, ST yang mengatakan:

*“dimulai dari proses rekrutmen apabila ada kecurangan kami melibatkan kesra untuk mengecek kembali untuk mengetahui apakah anak yang akan memperoleh ini terdata dalam DTKS. Selain itu, jika dalam proses pelaksanaan terdapat ada kendala, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku OPD teknis dalam program ini langsung mengkoordinasikan dengan Bappeda/Sekda, Baznas, Kesra dan pihak kampus untuk mengatasi masalah yang terjadi.”* (Wawancara, 25 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa pemerintah sebagai implementor kebijakan telah berupaya cepat tanggap dalam mengatasi problem yang terjadi dan agar tidak adanya tumpang tindih sehingga meminimalisir permasalahan yang tidak diinginkan dalam implementasi Saga Saja di Kota Pariaman. Jika dilihat melalui pemahaman implementor terhadap program ini para implementor kebijakan sudah menjelaskan SOP dari masing-masing wewenang kerja dan sudah memahami tupoksi masing-masing keterlibatannya dengan program ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Peraturan Walikota (perwako) No. 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembeirian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman.

### **c. Intensitas disposisi implemeintor**

Yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implemeintor. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai. Kebijakan publik biasanya bukan merupakan sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman pemerintah sudah memecahkan sebagian masalah sosial yang terjadi dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Pariaman dan meminimalisir angka keiskinan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan Bapak Bisri Amra, SE, M.Si selaku Peireincana Ahli Muda di Bappeda yang mengatakan:

*“ketika sebuah program diluncurkan dan telah dituangkan dalam berbagai dokumen, pastinya selalu ada evaluasi terhadap program yang sudah direncanakan. Sejauh ini berdasarkan rapat-rapat evaluasi yang kita lakukan Program Saga Saja ini dianggap salah satu program yang mendapat respon yang sangat baik dan dirasakan kebermanfaatannya terhadap masyarakat. Secara angka dapat dipresentasikan sudah 95% kalau dilihat dari nilai keberhasilannya selama kami implementasikan.”* (Wawancara, 29 April 2024).

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Mahasiswa Penerima Saga Saja periode 2018, yaitu Putri Ramadhani jurusan Administrasi Bisnis dari Politeknik Negeri Padang mengatakan bahwasannya:

*“jika dilihat perkembangan program Saga Saja dari pertama saya mendapatkan kemudian sebagai lulusan dari program ini dan saya melihat ada kemajuan yang bagus dari pada tahun 2018 yang dimana saat itu baru launching jadi belum terlihat totalitasnya pemerintah dalam mengelola d dibandingkan sekarang, kalau dinilai atau dipreferensikan secara angka saya menilai 90% dari 100% untuk program Saga Saja saat ini”.* (Wawancara, 5 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa preferensi nilai yang di miliki oleh badan pelaksana kebijakan dan nilai yang dijadikan rujukan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah nilai ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga undang-undang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, Kondisi eiksteirnal peilaksana kebijakan mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan, dimana dalam suatu organisasi pelaksana terjalin suasana kerja yang baik akan sangat eifeiktif dalam mengimplemeintasikan kebijakan.

### **Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana**

Berdasarkan uraian – uraian di atas peneliti dapat mengidentifikasi beberapa faktor-faktor yang menghambat Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman. Pada prinsipnya Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman telah berjalan cukup baik, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor – faktor yang menghambat implementasi diantaranya:

#### **1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) peneirima program Saga Saja di Kota Pariaman**

Rendahnya kualitas sumber daya manusia meirupakan salah satu masalah yang cukup mendasar namun dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi di suatu daeirah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat dan berakibat pada rendahnya produktivitas dan teirjadi peningkatan angka keimiskinan sehingga masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kunci yang meimpengaruhi dalam proseis Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Saga Saja) di Kota Pariaman. Ada beberapa hal yang mempengaruhi implementasi program saga saja di kota pariaman, diantaranya:

- a. Nilai yang tidak meincukupi sesuai dengan keteintuan yang beirlaku sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mahasiswa untuk lulus seleksi ujian perguruan tinggi dalam program Saga Saga. Hal ini ditunjukkan beirdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasubag Umum dan Program di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu bapak Qadri Eka Putra, ST yang mengatakan:

*“karena tes ujian seleksi ditangani oleh pihak kampus yang dipilih mereka jadi dikategorikan bersaing secara umum. Ada beberapa dari mereka yang mendaftar menerima dan ada juga yang mengeluh ketika sudah mendapatkan tempat kuliah tapi*

*tidak sesuai dengan yang diinginkan karena nilai yang tercapai. Contohnya : peminatan mahasiswa tersebut di ITB jurusan elektro, tapi dalam seleksi tidak lulus masuk perguruan tinggi tersebut. Hal ini menunjukkan dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki tidak tercapai untuk lulus.” (Wawancara, 25 April 2024)*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan Bapak Bisri Amra, SE, M.Si selaku Perencana Ahli Muda di Bappeda yang mengatakan:

*“Saga Saja ini secara biaya tidak melihat terlalu besar atau tidaknya, tetapi yang penting kita tertuju pada targetnya, dimana target ini disesuaikan dengan anggaran yang diberikan. Setiap tahun rekrutmen kami juga selalu menargetkan mahasiswa yang akan memperoleh program ini dengan ketentuan syarat nilai yang bagus untuk lulus seleksi.” (Wawancara, 29 April 2024).*

- b. Kurangnya keseriusan mahasiswa untuk menjalankan program sehingga berhenti /atau tidak melanjutkan hingga mendapat gelar. Dalam hal ini, nilai IPK mahasiswa setiap semester ditentukan, minimal 2,75. Apabila tidak mencapai nilai tersebut atau kurang nilainya. Maka bantuan anggaran mahasiswa yang bersangkutan dihentikan. Dan jika semester berikutnya mencapai nilai standart yang tercantum maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menerima bantuan anggaran kembali. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Husnal Prima, S.HI selaku Sekretaris Baznas yang meingatakan:

*“Sejauh ini dalam implementasi Saga Saja sudah berlangsung kurang lebih 7 tahun. Tetapi dalam ketentuannya masih tetap sama nilai IPK mahasiswa setiap semester ditentukan, minimal 2,75. Kalau kurang maka semester berikutnya tidak diberikan beasiswa dan uang saku. Karena ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri.” (Wawancara, 29 April 2024)*

Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Umum dan Program di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu bapak Qadri Eka Putra, ST yang mengatakan:

*“rata-rata masih banyak anak ini yang membawa kebiasaan mereka waktu SMA malas-malasan belajar, hal itu membuat rendah ipk. Ketika ipk rendah maka semester berikutnya otomatis tidak dapat beasiswa dan uang saku dari program in. Dan hal ini terkadang membuat mahasiswa tersebut berhenti dalam program ini dan tidak melanjutkan kuliah nya karena tidak ada biaya dan ke konsistenan nya utk menyelesaikan studi nya.” (Wawancara, 25 April 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwasannya suatu program yang dijalankan oleh pemerintah memiliki keitentuan-keteintuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah Kota Pariaman sudah menetapkan ketentuan tersebut berdasarkan Peraturan walikota (perwako) nomor 16 Tahun 2021. Maka dari atas ketetapan nilai IPK mahasiswa setiap semester telah ditentukan, dengan angka minimal IPK 2,75. Apabila tidak mencapai nilai tersebut atau kurang nilainya maka bantuan anggaran mahasiswa yang bersangkutan dihentikan. Dan jika seimesteir berikutnya mencapai nilai standart yang tercantum maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menerima bantuan anggaran kembali. Oleh karena itu, jika

memang ada keinginan seorang mahasiswa ini untuk menempuh dunia pendidikan maka akan tetap konsisten dalam menjalankan program.

## 2. Keterlambatan pencairan dana beasiswa

Pencairan dana beasiswa yang lama mengakibatkan Mahasiswa terlambat membayar UKT dan tertunda dalam pengisian KRS. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Mahasiswa Penerima Saja Saja periode 2020, yaitu Firda Zuliya jurusan Manajemen Logistik Industri Agro dari Politeknik Akademi Teknologi Industri Padang yang mengatakan:

*“sebagai penerima program beasiswa program Satu Keluarga Satu Sarjana menurut saya program ini sangat baik, namun tetap ada kendala yang saya alami. Pertama, dikarenakan keluarnya hasil pembelajaran/ IPK itu cukup lama, sehingga IPK yang ingin kami kumpulkan ke pihak pemko tersebut menjadi lama untuk dikumpulkan. Maka dari itu, proses pencairan dana juga ikut lama dikarenakan persyaratan untuk menerima beasiswa selanjutnya itu yaitu hasil dari pembelajaran/ipk tersebut. Jadi, dikarenakan proses penerimaan atau pencairan dana terlambat, maka dari itu juga terkendala di dalam melakukan pembayaran UKT karena proses pembayaran UKT sudah jatuh tempo dari pencarian dana pemko tersebut sehingga itu cukup memakan waktu dan terkendala dalam melakukan pengisian KRS.”* (Wawancara, 16 April 2024).

Pernyataan di atas juga didukung hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Bisri Amra, SE, M.Si selaku Peirencana Ahli Muda di Bappeda yang mengatakan:

*“memang pencairan dana itu terkadang lama karena program ini termasuk di luar kewenangan daerah seperti Saga Saja ini. Karena kewenangan Daerah menyekolahkan seorang anak itu hanya dari SD-SMP, dan SMA sudah kewenangan provinsi. Sedangkan Saga Saja/ perguruan tinggi ini masuk dalam kewenangan men-ristek oleh dinas pendidikan. Tapi karena sudah menjadi program unggulan, jadi penekan kita bukan ke saga saja nya. Penekanan kita ke warga miskin yang secara ini tidak mampu, maka anak ini kita kuliahkan. Jadi sebuah program di luar kewenangan ini bagian dari kesra (Kesejahteraan Rakyat). Jadi kemaren itu sempat lama karena memang awalnya kita antarkan dulu ke dinas pendidikan, karena di luar dari kewenangan di pindahkan ke kesra, jadi jikalau sudah pindah ke Kesra maka juga perlu perubahan APBD untuk merealisasikan sebuah anggaran itu. Hal itulah membuat prosesnya menjadi lama. Karena memang kan terkadang keuangan sebuah daerah itu perlu mempertimbangkan program mana yang harus direalisasikan. Karena program saga saja program unggulan maka tetap kita kawal dan direalisasikan.”* (Wawancara, 29 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui memang terdapatnya kendala atas pencairan dana beasiswa itu lama, akan tetapi karena Program Satu Keluarga Satu Sarjana termasuk salah satu program unggulan pemerintah kota pariaman tetap di kawal dan direalisasikan, apabila terdapatnya suatu kendala pemko pariaman langsung mengkoordinasikan dengan OPD terkait yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bappeda, Baznas, Mahasiswa, Perguruan tinggi yang terikat MOU serta seperangkat daerah yang terlibat dalam menjalankan dan mensukseskan program ini.

## SIMPULAN

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) penerima program Saga Saja di Kota Pariaman. Hal ini didasari nilai yang tidak mencukupi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mahasiswa untuk lulus seleksi ujian perguruan tinggi dalam program Saga Saga. Dan kurangnya keseriusan mahasiswa untuk menjalankan program sehingga berhenti /atau tidak melanjutkan pendidikan hingga mendapat gelar. Keterlambatan pencairan dana beasiswa yang mengakibatkan Mahasiswa terlambat membayar UKT dan Tertunda dalam pengisian KRS sehingga.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahan

- Anggleni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Seikip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(1), 24-39.
- Ayudia, C. (2020). Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan partisipasi orang tua di sdn kecamatan pariaman utara kota pariaman. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 100-107.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(2).
- Boreel, M. S., & Meigawati, D. (2022). Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(3), 5377-5388.
- BPS Kota Pariaman, 2019. Kota Pariaman Dalam Angka 2019. Dari <https://pariamankota.bps.go.id/publication/2019/08/16/96477c2cc830e293839c714c/kota-pariaman-dalam-angka-2019.html>
- Dalmeda, M. A., & Elian, N. (2017). Makna tradisi Tabuik oleh masyarakat Kota Pariaman (Studi deskriptif inteiraksionisme simbolik). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(2), 135-150.
- Handayono, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Ichسانی, M. G., & Rahminawati, N. (2023, August). Implikasi Pendidikan yang terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 71 terhadap Pendidikan Sosial. In Bandung Conference Series: Islamic Education (Vol. 3, No. 2, pp. 875-882).
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta, RI.
- Indonesia, P. R. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Kusmayadi, N. W., & Hertati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 122-129.
- Mabel, A., Riswanda, R., & Kader, A. (2023). Evaluasi Kebijakan Sop Kepolisian Tentang Masa Demonstrasi Dalam Pengamanan Kepolisian Di Polres Kota Ternatei. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(5), 317-328.
- Malik, Z. A., & Syafaruddin, M. (2023). Pengelolaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (Laz Sukoharjo). *Journal on Education*, 5(2), 4235-4247. <https://doi.org/10.31004/joei.v5i2.1139>
- Manasikana, A., & Anggraeni, C. W. (2018). Pendidikan karakter dan mutu pendidikan indonesia. *Seminar Nasional Pendidikan 2018*.

- Mokat, C. (2020). Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Meilaksanakan Peinanganan Fakir Miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. *Lex Et Societatis*, 8(2).
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Nata, H. A. (2016). *Pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an*. Prenada Media.
- Noor, J. (2011). *Metodelogi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang *Pendanaan Pendidikan*, Jakarta.
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2021 Tentang *Petunjuk Teknik Pemberian Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Pada Program Satu Keluarga Satu Keluarga Satu Sarjana*
- Pratiwi, S. N. (2018). *Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X dan XI IPS SMA N Bernas Pangkalan Kerinci Tahun Ajaran 2015/2016* (Doctoral dissertation, Univeirsitas Islam Riau).
- Pristiwanti, D., Badariah, B. ., Hidayat, . S. ., & Dewi, R. S. . (2022). Peingertian Peindidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911–7915 Putong, L. B., & Wahyudi, K. E. (2022). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 338-345.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Syarif, Nofiardi., Elva Ronaning Roem,. & Ernita Arif. (2021). *Strategi Komunikasi Peimerintah Kota Pariaman Pada Program Satu Keiluarga Sarjana*
- Suwitri, S. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- Usman, H. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wicaksono, A., & Siska, Y. (2020, May). *Wajib Belajar 12 Tahun Rekomendasi Kebijakan Peindidikan Meneingah Universal (PMU)*. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*.